

***THE INFLUENCE OF VILLAGE FUNDS ON COMMUNITY INCOME IN
PANDANKRAJAN VILLAGE, KEMLAGI DISTRICT, MOJOKERTO REGENCY***

**PENGARUH DANA DESA TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DI
DESA PANDANKRAJAN, KECAMATAN KEMLAGI, KABUPATEN
MOJOKERTO**

Yuli Setyaningsih¹, Siti Sundari²

Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur^{1,2}

19013010012@student.upnjatim.ac.id¹, sitisundari.ak@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

The community empowerment program is still minimal and the economic level of the villagers is still low because the average villager's profession as a farmer forms the basis of this research. The purpose of this study was to test and prove the effect of physical development and community empowerment on the income of the people of Pandankrajan Village. The population used is the Pandankrajan village community of 2900 people. Purposive sampling was used to select a sample and obtain 97 respondents who met the requirements, namely the headman, village secretary, finance officer, planning officer, Village Consultative Body, head of government, head of welfare, head of service, head of hamlet, head of RT and RW, and people who are members of savings and loans. This study uses primary data. The primary data in this study were taken through direct distribution of questionnaires. The analysis technique used is SEM-PLS. The results showed that community empowerment had a positive and significant impact on people's income, because the empowerment program provided by the Pandankrajan village government had a better impact on the people's economy. Meanwhile, physical development has a negative and significant impact on people's income, so that increased physical development actually reduces people's income.

Keywords: *Physical Development, Community Empowerment, Community Income*

ABSTRAK

Program pemberdayaan masyarakat yang masih minim serta taraf ekonomi warga desa yang masih rendah karena rata-rata profesi warga desa sebagai petani menjadi dasar penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji dan membuktikan pengaruh pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat terhadap pendapatan masyarakat Desa Pandankrajan. Populasi yang digunakan adalah masyarakat desa Pandankrajan sebanyak 2900 jiwa. *Purposive sampling* digunakan untuk memilih sampel dan mendapatkan 97 responden yang memenuhi persyaratan, yakni kades, sekdes, kaur keuangan, kaur perencanaan, Badan Permusyawaratan Desa, kasi kesra, kasun, ketua RT dan RW, serta masyarakat yang tergabung dalam simpan-pinjam. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis berupa SEM-PLS. Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan masyarakat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan masyarakat, dikarenakan program pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah desa Pandankrajan memberikan dampak yang lebih baik terhadap perekonomian masyarakatnya. Sedangkan pembangunan fisik memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan masyarakat, sehingga meningkatnya pembangunan fisik justru menurunkan pendapatan masyarakat.

Kata kunci: *Pembangunan Fisik, Pemberdayaan Masyarakat, Pendapatan Masyarakat*

PENDAHULUAN

Keberhasilan maupun ketidakberhasilan dari pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dan penggunaan dana desa sangat mempengaruhi masyarakat. Seperti desa Purwomatani, Kabupaten Sleman – Jawa Tengah dinilai berhasil karena dalam pelaksanaan kegiatan baik secara proses perencanaan maupun administrasi diprioritaskan dalam pembangunan fisik Kabupaten Sleman (2022), kemudian Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dinilai berhasil karena mampu melibatkan seluruh elemen, komponen dan aparat desa dalam mengelola dan mendirikan BUMDes. Selain itu, pemerintah maupun perangkat desa mampu menggunakan dana sesuai dengan perencanaan serta transparan kepada masyarakat. Desa Pandankrajan dijadikan sebagai BUMDes terbaik se-kecamatan dan sebagai percontohan bagi desa lain yang ada di Kecamatan Kemlagi.

Desa Pandankrajan merupakan sebuah desa di wilayah Kecamatan Kemlagi, dengan sebagian besar penduduk yang bekerja sebagai petani, peternak, dan pedagang. Pada tahun 2018 Pandankrajan mengembangkan usaha baru yaitu Pertamina, sehingga mampu menambahkan pemasukan keuangan pada BUMDes. Bahkan hasil usaha BUMDes paling besar di dapat dari Pertamina tersebut. Hal ini menjadikan kinerja BUMDes sebagai tolak ukur terhadap kemampuannya dalam mengelola dana untuk mensejahterakan masyarakat desa. Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto sebanyak 111,03 ribu jiwa. Sementara itu, pada tahun 2021, Kabupaten Mojokerto memiliki proporsi penduduk miskin mencapai 120,54 ribu jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk miskin Kabupaten

Mojokerto pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 9,71% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pelaksanaan seluruh program dan aktivitas operasional desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan dibiayai oleh dana desa. Peran pemerintah yaitu memberikan sarana kepada masyarakat desa untuk mendirikan BUMDes dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, sehingga dana desa yang dikelola dapat dilakukan secara jelas, bertanggungjawab, dan professional sesuai dengan target dan tepat sasaran (Bere et al., 2022). Menurut Suryani (2019), Pengelolaan dana desa diawali dengan merencanakan program, dilanjut dengan pelaksanaan, dan diakhiri dengan pertanggungjawaban. Prioritas dari pengelolaan dana desa yaitu kebutuhan masyarakat dan program dari perangkat desa. Masyarakat perlu terlibat sebagai sasaran dari program dana desa atas dilaksanakannya pengelolaan dana desa. Kebijakan implementasi dana desa dimulai sejak tahun 2015, Kabupaten Mojokerto tetap fokus pada pemberdayaan masyarakat, sehingga program pembangunan dan sarana fisik kurang mendapatkan perhatian. Pemerintah berharap dengan dana desa dapat meringankan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, mengembangkan pembangunan dan sarana fisik, serta mengembangkan produk lokal.

Menurut Edwar et al. (2020), Pembangunan fisik didefinisikan sebagai usaha pemerintah untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk perubahan secara nyata. Pembangunan kawasan pedesaan menjadi prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan warga. Dibutuhkan sejumlah anggaran pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan yang mengarah pada peningkatan ekonomi masyarakat. Tujuan perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan daerah yaitu untuk mengembangkan serta memberdayakan UKM, hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya perkiraan biaya dari pembangunan pedesaan baik dalam bentuk fisik ataupun non fisik (Utomo, 2019).

Penelitian Damar et al. (2021), membuktikan bahwa pembangunan fisik memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan masyarakat. Hal ini berarti masyarakat membutuhkan pembangunan fisik untuk memberikan dampak pada perekonomian desa dan kehidupan komersial desa. Masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung apabila pembangunan fisik dilaksanakan dengan benar. Namun, hasil penelitian Caya & Rahayu (2019), menunjukkan bahwa pembangunan fisik tidak berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat karena pendapatan masyarakat masih belum meningkat meskipun pembangunan fisik telah dilaksanakan.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan sumber daya manusia untuk membentuk dan mengubah perilaku masyarakat menuju kehidupan dan taraf hidup yang lebih baik. Pemberdayaan juga memfokuskan seseorang untuk dapat mengembangkan skill, wawasan, dan kekuatan yang guna memengaruhi kehidupannya sendiri dan kehidupan orang lain (Auralia, 2022). Pemberdayaan masyarakat membentuk sikap proaktif dan kemampuan mengelola sumber dayanya sehingga masyarakat dapat memimpin dan mengeksplorasi keterampilan pribadi, kreativitas, keahlian, dan kemampuan berpikir sehingga mengubah kehidupan mereka seperti yang diharapkan (Margayaningsih, 2018).

Penelitian Pinilas et al. (2019), membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Hal ini

menunjukkan pengelolaan dana desa dengan memberikan program pemberdayaan seperti memberikan modal usaha, memberikan pupuk dan bibit, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Namun hasil penelitian Ridha (2019), menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dari program yang diberikan kepada masyarakat belum dirasakan manfaatnya, hal ini dibuktikan dengan pendapatan masyarakat yang tidak mengalami perubahan meskipun program pemberdayaan sudah berjalan.

Pemberdayaan masyarakat berarti mengajak masyarakat untuk menaruh perhatian dan berperan aktif dalam mengendalikan kebutuhannya sendiri, begitu juga dengan pembangunan fisik akan mampu mengembangkan potensi yang ada di masyarakat (Putubasai, 2018). Pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat akan berjalan baik apabila perangkat desa selaku penanggungjawab atas pengelolaan dana desa menerapkan teori *New Public Management*. Konsekuensi dari penerapan NPM oleh pemerintah desa adalah peningkatan efisiensi, pengurangan biaya, peningkatan daya saing, dan perubahan peran pemerintah, terutama dalam hubungan masyarakat (Halimatus, 2022). Dengan berbagai program pengelolaan usaha dan dana desa oleh BUMDes Pandankrajan memberikan dampak positif terlebih pada penghasilan warga desa. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dikarenakan BUMDes berperan dalam mengelola dana desa dan variabel yang digunakan yaitu menghubungkan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat terhadap pendapatan masyarakat, berbeda dengan penelitian (Herlina & Hermana, 2018)

dan (Hulu et al., 2018). Penelitian ini penting karena masih belum terlihat capaian secara menyeluruh meskipun telah berlaku undang undang tentang Desa dan diberikannya dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui BUMDes dan hasil dari penelitian ini penting, dalam memberikan saran terhadap perangkat desa untuk mensosialisasikan perencanaan program agar seluruh masyarakat mampu berpartisipasi terhadap kegiatan yang diberikan.

Kebaruan penelitian ini adalah pembangunan fisik berupa pertamini dan koperasi sembako yang didirikan atas nama BUMDes Pandankrajan. Pendirian pertamini dengan nama Pertashop Pandankrajan bertujuan untuk memudahkan masarakat dalam memperoleh bahan bakar minyak dikarenakan jarak dari desa menuju pertamina cukup jauh. Sedangkan koperasi sembako didirikan guna meringankan harga bahan pokok bagi masyarakat dan meringankan penggunaan dari BBM, selain itu, keuntungan dari kedua pembangunan tersebut akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU) yang dapat diambil satu tahun sekali.

Literature Review

Teori *New Public Management*

Pengelolaan dana desa dengan teori *New Public Management* yang disampaikan oleh Hood (1991), yaitu sistem pengelolaan yang terdesentralisasi dengan pengelolaan perangkat manajemen baru seperti pengawasan, perbandingan, dan pengurangan biaya operasi. Menurut Hartati (2020), gagasan di balik NPM adalah untuk menerapkan praktik manajemen sektor swasta ke manajemen sektor publik untuk mempromosikan operasi manajemen

yang efisien dan efektif sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat. Fokus yang digunakan oleh NPM yaitu pada pengendalian manajemen pemerintah yang berorientasi pada hasil kinerja (Haryani et al., 2023). Adanya pengimplementasian NPM ini akan berdampak positif terhadap pemerintah karena peningkatan efisiensi, pengurangan biaya, peningkatan daya saing, dan perubahan peran pemerintah, terutama dalam hubungan masyarakat.

Penggunaan teori NPM pada pemerintah desa bertujuan untuk mengimplementasikan transparansi serta mengukur kinerja pemerintah dalam penggunaan dana desa. NPM memiliki fokus yang kuat terhadap organisasi internal yang berarti NPM akan berusaha untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah dengan menerapkan metode yang umumnya digunakan oleh sektor privat (Indahsari & Raharja, 2020). Penerapan teori NPM, akan mempengaruhi organisasi pemerintah dalam meningkatkan kinerja internal sehingga dapat memberdayakan masyarakat sehingga pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat dapat meningkat. Selain itu, dalam Setiyono (2019), NPM memiliki karakteristik yang mengandung 7 komponen utama, yaitu:

1. Manajemen merupakan fokus utama.
2. Standar kinerja yang jelas dan indikator kinerja utama.
3. Fokus pada hasil dan akibat.
4. Pembagian kelompok kerja pada pemerintahan.
5. Meningkatnya persaingan di sektor publik.
6. Penekanan pola pengelolaan sektor swasta kepada sektor publik.

7. Penggunaan sumber daya yang dengan lebih disiplin dan lebih besar dalam penghematan.

Pendapatan Masyarakat

Junianto (2018), mengartikan pendapatan masyarakat sebagai pembayaran upah atau kompensasi dari hasil usaha yang dicapai oleh individu atau kelompok keluarga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan diterima dalam satu bulan. Sementara itu, Sairin et al. (2020), mendefinisikan pendapatan masyarakat sebagai kemampuan masyarakat untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan pokok, kebutuhan sosial, dan kebutuhan lain. Kapasitas ini ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan keluarga, pengeluaran keluarga (daya beli), dan tabungan keluarga. Pendapatan masyarakat merupakan imbalan yang diterima setiap orang atau keluarga untuk menyelesaikan pekerjaan pada periode waktu tertentu. Kemampuan masyarakat untuk membayar semua biaya dan aktivitasnya meningkat seiring dengan pendapatan yang diperoleh (Irianti et al., 2018).

Dana Desa

Menurut Hastuty & Priono (2021), dana desa adalah sejumlah uang yang disalurkan melalui APBD Kab/Kota digunakan untuk membelanjai pelaksanaan pemerintahan, baik dalam bidang pembangunan, dan pemberdayaan yang mana dananya berasal dari APBN. Menurut Damar et al. (2021), Dana desa merupakan sumber daya pemerintah pusat yang tersedia bagi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan program pembangunan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat desa

melalui pemberdayaan maupun pembinaan kemasyarakatan agar memberikan kemudahan pada warga desa untuk meningkatkan pendapatan melalui dana desa. Program pengembangan masyarakat dan pembangunan fisik desa menjadi prioritas dalam penggunaan dana desa (Firdaus et al., 2020). Umumnya dana desa digunakan dengan tujuan untuk memperluas kemajuan desa sehingga dapat menjamin kesejahteraan kepada masyarakat secara menyeluruh (Novitasari & Sari, 2022).

Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik digambarkan sebagai upaya dari suatu negara atau pemerintah untuk melakukan tindakan guna menciptakan perbaikan nyata berupa perubahan yang lebih baik (Utomo, 2019). Menurut Edwar et al. (2020), perubahan ini sama atau sangat mirip dengan perubahan bentuk atau bentuk pertumbuhan fisik desa. Pembangunan fisik merupakan perbaikan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat atau yang dapat dilihat secara kasat mata. Tuntutan yang berasal dari perkembangan dan kemajuan kegiatan sosial budaya masyarakat ditunjukkan dalam kemajuan fisik.

Zikri & Jamaluddin (2019), mendefinisikan pembangunan fisik sebagai suatu usaha pemerintah untuk meningkatkan kegiatan operasional dan perubahan yang dapat dilihat secara konkrit dan jelas. Infrastruktur dikembangkan secara fisik berperan penting dalam mendukung berbagai kegiatan sosial dan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan kesejahteraan rakyat. Apabila pembangunan fisik dilakukan dengan benar dan sesuai dengan harapan masyarakat, maka pendapatan akan

peningkatan. Sependapat dengan penelitian Damar et al. (2021), bahwa pembangunan fisik berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat karena pembangunan fisik dibutuhkan oleh masyarakat sehingga memberikan dampak perekonomian desa, pengembangan usaha, dan motivasi masyarakat untuk memulai usaha baru.

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mokoagow et al. (2020), pengembangan masyarakat dan pembangunan berbasis masyarakat termasuk dalam gagasan pemberdayaan, sehingga memerlukan pemahaman tentang makna dan pentingnya pemberdayaan masyarakat. Dalam gagasan pemberdayaan sering dikaitkan dengan gagasan keadilan, jaringan, kemandirian dan partisipasi. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memberikan harkat dan martabat yang lebih kepada kelompok masyarakat kurang mampu sehingga mereka dapat terbebas dari siklus keterbelakangan dan kemiskinan (Safira & Idris, 2020). Untuk mendukung hal tersebut, kini banyak bermunculan program dari pemerintah pusat maupun daerah yang bertujuan untuk mendorong kemampuan masyarakat desa dalam meningkatkan nilai kearifan lokal dan modal sosial dalam bentuk pemberdayaan masyarakat (Amin & Widaningsar, 2019).

Candra (2019), mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat memerlukan partisipasi dari pihak pemberdaya dan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memperkuat potensi ekonomi sehingga tidak terlalu bergantung pada program bantuan tetapi mampu

menjalankan usaha sendiri dan berinteraksi dengan sesama. Tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu memandirikan anggota masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia sehingga mampu meningkatkan perekonomian keluarga. Sementara itu, Paringan et al. (2022), mengatakan pemberdayaan masyarakat adalah salah satu aspek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat secara terus menerus memudahkan berkembangnya potensi masyarakat, sehingga pendapatan akan meningkat.

Pemberdayaan masyarakat berperan penting dalam membuat keadaan yang lebih adil dan partisipatif, serta bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat. Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pola pikir masyarakat menjadi lebih baik, sehingga kualitas hidup dan kesejahteraannya secara bertahap dapat meningkat. Sependapat dengan penelitian Pinilas et al. (2019), bahwa program yang disampaikan melalui pemberdayaan masyarakat memberikan pelatihan khusus tentang bagaimana melaksanakan kegiatan masyarakat untuk memberdayakan pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat.

METODE PENELITIAN

Populasi yang dipilih ialah seluruh masyarakat desa Pandankrajan dengan jumlah 2900 jiwa. Sampel diambil menggunakan *non-probability* yaitu *purposive sampling*. Jumlah sampel didapatkan sebanyak 97 responden yang memenuhi persyaratan, diantaranya kades, sekdes, kaur keuangan, kaur perencanaan, Badan

Permasyarakatan Desa, kasi kesra, kasun, ketua RT dan RW, serta masyarakat yang tergabung dalam simpan-pinjam. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis berupa SEM-PLS.

Variabel pendapatan masyarakat diukur menggunakan skala likert dengan indikator pendapatan masyarakat menurut Fitroh (2019), antara lain: pengaruh pembangunan fisik, fasilitas fisik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan pengembangan sumber daya alam. Variabel pembangunan fisik diukur menggunakan skala likert dengan indikator pembangunan fisik menurut Gultom & Tini (2020), antara lain: infrastruktur desa yang baik, fasilitas umum yang memadai, infrastruktur yang baik, dan kesejahteraan masyarakat. Variabel pemberdayaan masyarakat diukur menggunakan skala likert dengan indikator pemberdayaan masyarakat menurut Wulandari et al. (2022), antara lain: kegiatan yang sistematis dan kolektif, meningkatkan dan memperbaiki ekonomi masyarakat, memprioritaskan kelompok lemah, dan program peningkatan kapasitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Uji Convergent Validity

Tabel 1.

	PF	PB	PM
X1.1	0,873		
X1.2	0,812		
X1.3	0,875		
X1.4	0,856		
X2.1		0,785	
X2.2		0,755	
X2.3		0,833	
X2.4		0,899	
X2.5		0,796	

Y1	0,781
Y2	0,744
Y3	0,781
Y4	0,833
Y5	0,788

Sumber: Output SmartPLS (2023)

Pada tabel 1 indikator X1.1 sampai dengan X1.4 memiliki nilai *Loading Factor* >0.7, menunjukkan bahwa semua konstruk atau variabel laten telah mencerminkan nilai yang diharapkan dari uji validitas *convergent*.

Uji Discriminant Validity

Tabel 2.

	PF	PB	PM
X1.1	0,873	0,005	-0,275
X1.2	0,812	-0,048	-0,154
X1.3	0,875	-0,051	-0,292
X1.4	0,856	0,016	-0,251
X2.1	-0,070	0,785	0,578
X2.2	0,029	0,755	0,498
X2.3	-0,018	0,833	0,612
X2.4	-0,051	0,899	0,675
X2.5	0,035	0,796	0,619
Y1	-0,187	0,555	0,781
Y2	-0,212	0,482	0,744
Y3	-0,301	0,598	0,781
Y4	-0,209	0,688	0,833
Y5	-0,253	0,540	0,788

Sumber: Output SmartPLS, 2023

Tabel 3.

	Average Variance Extracted (AVE)
Pembangunan Fisik	0,618
Pemberdayaan Masyarakat	0,665
Pendapatan Masyarakat	0,730

Sumber: Output SmartPLS, 2023

Berdasarkan tabel 2 dan 3, seluruh variabel memiliki nilai *cross loading* >0,7 dan AVE >0,5. Kesimpulannya yaitu seluruh variabel laten telah mencerminkan nilai yang

diharapkan dari uji validitas *discriminant*.

Uji Reliability Composite

Tabel 4.

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Pembangunan Fisik	0,846	0,890
Pemberdayaan Masyarakat	0,873	0,908
Pendapatan Masyarakat	0,879	0,915

Sumber: Output SmartPLS, 2023

Berdasarkan tabel 4, memiliki nilai *cronbach's alpha* >0,6 dan *composite reliability* >0.7, sehingga dapat diartikan seluruh konstruk atau variabel laten telah mencerminkan nilai yang diharapkan dari uji reliabilitas.

R-Squares (R^2)

Tabel 5

	R Square	Adjusted R Square
Pendapatan Masyarakat	0,621	0,612

Sumber: Output SmartPLS, 2023

Berdasarkan Tabel 5, memberikan nilai sebesar 0.621 untuk konstruk pendapatan masyarakat, yang berarti pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat mampu menjelaskan variansi pendapatan masyarakat sebesar 62,1%.

Predictive Relevance (Q^2)

Tabel 6.

	Predictive Relevance
Pendapatan Masyarakat	0,364

Sumber: Output SmartPLS, 2023

Berdasarkan Tabel *Predictive Relevance* (Q^2), nilai Q^2 sebesar 0,364 berarti bahwa model pada penelitian ini memiliki nilai predictive relevance yang baik, sehingga kemampuan prediksi model variabel independen seperti pembangunan fisik dan pemberdayaan

masyarakat telah sesuai dan dapat memprediksi dependen pendapatan masyarakat.

Path coefficient

Tabel 7.

	Original Sample (O)	T-Statistics	p-value
PF	-0.282	4.144	0.000
PM	0.730	15.171	0.000

Sumber: Output SmartPLS, 2023

Berdasarkan tabel 5, didapatkan hasil uji hipotesis yang didapatkan sebagai berikut:

1. Pembangunan fisik memperoleh nilai beta sebesar -0.282 dengan t-statistik sebesar 4.144 dan p-value sebesar 0.000, artinya pembangunan fisik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan masyarakat di Desa Pandankrajan.
2. Pemberdayaan masyarakat memperoleh nilai beta sebesar 0.730 dengan t-statistik sebesar 15.171 dan p-value 0.000, artinya pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan masyarakat di Desa Pandankrajan.

Pengaruh Pembangunan Fisik Terhadap Pendapatan Masyarakat

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pembangunan fisik justru pendapatan yang diterima oleh masyarakat semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh beberapa jenis pembangunan yang diberikan kurang berdampak pada pendapatan masyarakat. Penelitian ini tidak mendukung penelitian Damar et al. (2021), yang mengatakan bahwa pembangunan fisik memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan masyarakat. Secara teori, pembangunan fisik memberikan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat, karena pembangunan fisik yang diberikan oleh pemerintah desa mampu menekankan dalam penggunaan sumber

daya yang dimiliki, selain itu pembangunan fisik yang memadai memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilitas keluar dan masuk hasil panen. Dalam melaksanakan program pembangunan fisik desa, perlu menekankan kerjasama antara masyarakat dan perangkat desa, baik dalam perencanaan, penerapan, pelaksanaan maupun evaluasi (Herman, 2019). Penggunaan anggaran yang jelas harus diterapkan saat melaksanakan perencanaan program pembangunan. Kepastian anggaran sumber dana dapat mempengaruhi keberhasilan program pembangunan. Pelaksana program harus mengembangkan uraian tugas dan rencana dengan jelas sehingga sehingga para pelaksana lebih memahami tugas yang telah diberikan.

Pembangunan fisik berupa perbaikan jalan dan perbaikan puskesmas memberikan dampak positif terhadap masyarakat, namun terdapat kendala yang dihadapi oleh pemerintah Pandankrajan diantaranya harga BBM yang melambung tinggi membuat Pertashop tutup sementara sampai dengan harga BBM kembali stabil, dan terjadinya pencurian dana koperasi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab membuat koperasi mengalami kerugian sehingga menonaktifkan fungsi dari koperasi tersebut, yang menyebabkan pendapatan masyarakat menurun. Akibat tutupnya Pertashop dan koperasi sembako sehingga terjadi penggunaan bahan bakar berlebih mengakibatkan masyarakat kesulitan, sehingga harus membeli BBM dan bahan pokok yang lebih jauh dari desa dengan jarak kurang lebih 8km.

Penelitian ini didasarkan pada teori *New Public Management* yang dikembangkan oleh Hood (1991), menjelaskan bahwa organisasi sektor publik sangat mementingkan penerapan sumber daya dengan cermat dan tepat.

Pendapat ini mengharuskan organisasi pemerintah untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai, mengurangi penggunaan biaya langsung dan menciptakan proses yang menghasilkan peningkatan kualitas dengan biaya rendah. Misalnya, pemerintah harus memantau penggunaan sumber daya publik untuk menghindari pemborosan, kerusakan lingkungan, penyalahgunaan kelola, dan korupsi. Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Caya & Rahayu (2019), yang mengatakan bahwa pemerintah desa masih memengaruhi pengelolaan dana desa dalam bidang pembangunan, sehingga belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pendapatan Masyarakat

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa semakin meningkat pemberdayaan masyarakat maka pendapatan yang diterima masyarakat juga meningkat. Hal ini disebabkan program pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah desa dapat memberikan perubahan akan pola pikir, sikap dan keterampilan, serta mendorong partisipasi dan kepercayaan diri masyarakat. Fakta dilapangan menjelaskan bahwa BUMDes memiliki peran dalam memberdayakan warga Desa Pandankrajan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan warga desa sesuai dengan Perda Kab. Mojokerto No. 18 Th 2006 Tentang Pendirian dan Pengelolaan BUMDes. Simpan Pinjam ialah kegiatan menghimpun modal dari simpanan anggota secara terus menerus serta mengembalikan kepada anggota dengan mudah, cepat, tepat untuk keperluan produktif kesejahteraan (Sandi, 2020).

1. Simpanan Wajib Anggota

Pasal 7 (1a) AD/ART BUMDes Pandankrajan menyebutkan bahwa simpanan pokok anggota adalah

simpanan sebesar Rp. 10.000 yang harus dibayarkan oleh setiap anggota. Simpanan pokok dibayar tunai atau diangsur paling banyak 2 kali dalam sebulan setelah mengajukan permohonan keanggotaan. BUMDes mengharuskan setiap calon anggota untuk membayar Rp 10.000,- yang mana simpanan akan digunakan sebagai tambahan modal dalam menjalankan operasional BUMDes.

2. Simpanan Wajib Pinjam

Menurut pasal 7 (1b) AD/ART BUMDes, setiap peminjam BUMDes wajib memberikan setoran simpanan wajib pinjam. Besarnya simpanan wajib yang dimiliki oleh calon peminjam paling sedikit 3% (tiga persen) dari pokok pinjaman. Simpanan tersebut digunakan sebagai tambahan modal operasional BUMDes.

3. Pinjaman

Pasal 10 AD/ART BUMDes Pandankrajan, menyebutkan bahwa pinjaman hanya dapat diberikan untuk aktivitas ekonomi produktif dengan mempertimbangkan kemampuan, keinginan dan kesungguhan calon peminjam. Anggota BUMDes dan masyarakat yang memiliki usaha dapat menerima pinjaman tersebut. Pinjaman yang dapat diajukan oleh anggota hingga Rp 5.000.000, sesuai dengan ketersediaan dana BUMDes.

Penelitian ini didukung dengan teori *New Public Management* yang dikemukakan oleh Hood (1991), menjelaskan bahwa pemerintahan adalah milik masyarakat, menekankan kepemimpinan masyarakat sebagai hasil dari pemberdayaan pemerintah agar masyarakat dapat bekerja lebih baik. Akhirnya masyarakat menghidupi dirinya sendiri, tetapi pemerintah tetap memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan dasar. Dengan

begitu, aparaturnya memiliki lebih banyak komitmen, perhatian, dan kreatif dalam memecahkan masalah. Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Pinilas et al. (2019), yang menjelaskan pemberdayaan masyarakat mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa meningkatnya pembangunan fisik justru menurunkan pendapatan masyarakat. Semakin banyak pembangunan fisik yang diberikan oleh pemerintah desa maka akan semakin menurunkan pendapatan yang diperoleh masyarakat. Hal ini disebabkan pembangunan fisik berupa pertashop dan koperasi sembako yang kurang aman sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Sedangkan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Program pemberdayaan berupa simpan pinjam yang diberikan oleh pemerintah desa Pandankrajan memberikan dampak yang lebih baik terhadap perekonomian masyarakatnya. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan bertujuan untuk memperkuat potensi ekonomi kerakyatan sehingga tidak terlalu bergantung pada program bantuan melainkan dapat membuat masyarakat menikmati usahanya sendiri dan berinteraksi dengan sesama. Saran bagi pemerintah desa yaitu perlu lebih mensosialisasikan perencanaan program agar pembuatannya sesuai dengan anggaran, dan untuk menghindari hal buruk sebaiknya pemerintah memberikan penjaminan yang baik terhadap pertashop maupun koperasi sembako. Sedangkan untuk masyarakat desa sebaiknya berperan aktif dan berpartisipasi atas program yang diselenggarakan oleh pemerintah desa

agar anggaran dana dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya. Keterbatasan dari penelitian ini adalah jawaban responden mungkin tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya karena faktor yang mempengaruhi seperti kondisi responden yang kurang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S., & Widaninggar, N. (2019). Influence of Village Funds on Capital Accumulation and Community Empowerment. *Economics Development Analysis Journal*, 8(2), 163–173. <https://doi.org/10.15294/edaj.v8i2.27508>
- Auralia, F. (2022). Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Way Lunik Panjang Bandar Lampung. *Aleph*, 87(1,2), 149–200.
- Bere, F. I., Pala, A., & Bekun, S. (2022). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mina Piul dalam Meningkatkan Taraf Perekonomian Masyarakat Desa Oetalus, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 1–13. <https://doi.org/10.47753/pjap.v3i2.45>
- Candra, N. A. (2019). *Partisipasi Masyarakat Melalui Program Desa Vokasi Di Desa Wisata Batik Girilayu Kecamatan Matesih Karanganyar*. 19.
- Caya, M. F. N., & Rahayu, E. (2019). *Dampak BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung*. April, 1–12.
- Damar, V. I., Masinambow, V. A. J., Naukoko, A. T., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Ratulangi, U. S. (2021). *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Humbia Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro*. 21(03), 1–12.
- Edwar, M., Idris, A., & Mulka, S. R. (2020). Strategi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Dan Non Fisik Di Desa Suka Maju Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur (Periode 2014-2019). *Skripsi*, 1(1), 22.
- Firdaus, R., Prayugo, & Huda, N. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Ulu Pulau. *Bertuah: Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 69–77.
- Fitroh, M. A. A. (2019). *Pengaruh Pendapatan, Harga dan Selera Masyarakat Terhadap Permintaan Kartu Brizzi*.
- Gultom, R. Z., & Tini, A. Q. (2020). *Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial*. 6(02), 203–211.
- Halimatus, Z. (2022). *Implementasi New Public Management (Npm) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember*.
- Hartati, S. (2020). Penerapan Model New Public Management (Npm) Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 8(2), 65–84. <https://doi.org/10.33701/jmsda.v8i2.1293>

- Haryani, S., Akhdiyati, R., Iqbal, M., Mintarti, S., & Sari, W. I. R. (2023). Implementasi new public management (NPM) badan kepegawaian daerah (studi kasus Kabupaten B). *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5(25), 330–335. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art38>
- Hastuty, A. M., & Priono, H. (2021). *Pengelolaan Dana Desa Menuju Good Government Governance Pada Desa Pasar Lama Kabupaten Banjar*. 6(2), 6.
- Herlina, A., & Hermana, D. (2018). *Pengaruh Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Terhadap Efektivitas Pembangunan Fisik Di Desa Sukatani Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut*. 1–8.
- Herman. (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 78.
- Hood, C. (1991). a Public Management for All Seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasution, M. A. (2018). *Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat*. 10(1), 146–154.
- Indahsari, C. L., & Raharja, S. J. (2020). New Public Management (NPM) as an Effort in Governance. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 3(2), 73. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v3i2.25342>
- Irianti, M., Syahza, A., Asmit, B., Suarman, Riadi, R. M., Bakce, D., & Tampubulon, D. (2018). Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan limbah lidi kelapa sawit didesa sepehat kabupaten bengkalis. *Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9, 1–9.
- Junianto. (2018). Pengaruh Modal, Lama Usaha dan Sumber Daya Manusia Terhadap Pendapatan Pengusaha Tempe di Kecamatan Rantau Rasau. *Skripsi Fakultas Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam*, 21–24.
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Jurnal Publiciana*, 11(1), 72–88.
- Mokoagow, M., Lengkong, F. D., & Londa, V. Y. (2020). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Non Fisik Di Desa Tolotoyon Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(94), 1–8.
- Novitasari, H., & Sari, R. P. (2022). Determinan Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(1), 995–1007. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.4196>
- Paringan, D. D., Jenangan, K., Ponorogo, K., Putri, R., Zyahra, A., & Prathama, A. (2022). *Peran Kepala Desa dalam*

- Pelaksanaan Pembangunan Non Fisik Di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.* 22(3), 1583–1591.
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2586>
- Pinilas, A., Kumenaung, A., & Rorong, I. (2019). Pengaruh Dana Desa Terhadap Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(03), 85–96.
<https://doi.org/10.24967/sabura.ijssd.v2i1.329>
- Putubasai, E. (2018). Analysis of Community and Village Government Participation in Village Fund Management. *International Journal of Social Sciences and Development*, 2(1), 32.
<https://doi.org/10.24967/sabura.ijssd.v2i1.329>
- Ridha, F. (2019). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Langsa Kota.* 4(2), 252–276.
- Safira, M. Z., & Idris, A. (2020). *Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2019.* 8(1), 614–623.
- Sairin, Susanto, Suworo, Tarjiwo, & Fajri, C. (2020). Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dengan Menumbuhkan Jiwa Wirausaha di Kampung Sengkol RT06/02 Kelurahan Muncul Kecamatan Setu Tangerang Selatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 337–346.
- Sandi, S. (2020). Sistem Pendukung Keputusan Pinjaman Kredit Dengan Metode Analytical Network Process. *Jurnal Riset Sistem Informasi Dan Teknologi (JURSIKSTEKNI)*, 2(2), 25–38.
<https://doi.org/10.52005/jursistekni.v2i2.44>
- Setiyono, D. (2019). Analisis Penerapan New Public Management (NPM) Sebagai Kerangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Pada Balai Kesehatan/Rumah Sakit. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 3(1), 20–34. -
- Sleman, K. (2022). *Dinilai Sukses, Realisasi Dana Desa Di Sleman Rata-rata 100%.*
<http://www.slemankab.go.id/14193/dinilai-sukses-realisasi-dana-desa-di-sleman-rata-rata-100.slm>
- Suryani, A. (2019). *Manajemen Pengelolaan Dana Desa.* 4(2), 348–354.
<https://doi.org/10.33087/jmas.v4i2.117>
- Utomo, B. T. (2019). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Sinjai The Effect of Infrastructure Development on Community Economic Improvement in Sinjai District. *Issn 2656-8705*, 1(2), 50–57.
- Weruin, U. U. (2019). Teori-Teori Etika Dan Sumbangan Pemikiran Para Filsuf Bagi Etika Bisnis. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 313.
<https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i2.3384>
- Wulandari, S., Oktaviani, S., Adam, M. R., Barat, J., Author, C., Wulandari, S., & Pemerintahan, F. P. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Skill Development Centre (SDC)

Dalam Meningkatkan
Kewirausahaan Di Kabupaten
Bandung Barat. *Ilmiah
Administrasi Pemerintahan
Daerah*, 14(2), 310–333.

Zikri, M. A., & Jamaluddin, Y. (2019).
Peranan Pemerintah Kecamatan
Dalam Penyelenggaraan
Pembangunan Fisik Di
Kecamatan Tamiang Hulu
Kabupaten Aceh Tamiang.
*Inspirasi ; Jurnal Ilmu-Ilmu
Sosial*, 16(2), 164–176.